



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOVA ADIWIDANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 210539

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.457.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m<sup>2</sup>/72 m<sup>2</sup> di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m<sup>2</sup> di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah Seluas 7570 m<sup>2</sup> di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
4. Tanah Seluas 2900 m<sup>2</sup> di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 188.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA STAR SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. MOBIL, TOYOYA YARIS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, YAMAHA LEXI MOTOR MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 22.500.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 162.603.404

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.830.603.404



III. HUTANG

Rp. 31.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.799.203.404

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.